

ALASAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)

Wirda Wanda Sari Bekarekar

Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: wirda.bekarekar@yahoo.com

Abstrak-Penelitian ini menjelaskan mengapa Indonesia melakukan kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group. Anggota dari Melanesian Spearhead Group adalah negara-negara di wilayah Pasifik Selatan yang memiliki ras Melanesia. Visi dari Melanesian Spearhead Group adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia. West Papua National Coalition for Liberation terdaftar sebagai observer di Melanesian Spearhead Group. Dengan status associate member, Indonesia mencoba untuk mencegah meningkatnya pergerakan kelompok Papua merdeka sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group. Keterlibatan Indonesia di dalam Melanesian Spearhead Group menjadi ancaman bagi kelompok Papua merdeka untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui konsep Politik Luar Negeri dengan model Aktoor Rasional oleh Graham T. Allison bahwa terdapat alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa di ambil oleh pemerintah dalam memperhitungkan untung dan rugi atas masing-masing alternatif tersebut. Para pembuat keputusan harus selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Konsep ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui keterlibatan Indonesia di dalam Melanesian Spearhead Group. Alasan utama mengapa Indonesia melakukan kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group karena Indonesia mau mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group untuk mencegah kelompok Papua merdeka menjadi anggota tetap untuk menghambat pergerakan dalam memerdekakan Papua.

Keywords: Aktoor Rasional, Melanesian Spearhead Group, WPNCL, West Papua

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai rasionalitas Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia, dimana Presiden Joko Widodo menjadi subjek utama pelaku pembuat kebijakan.

Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah

teritori yang amat kecil, namun sebagian besar eksistensinya berada dalam suatu kawasan yang relatif "terang dan stabil". Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Sampai saat ini proses dekolonisasi di kawasan Pasifik Selatan belum selesai secara menyeluruh. Sejak terjadinya proses dekolonisasi, muncul negara-negara kecil baru di kawasan Pasifik yang menjadikan kawasan ini semakin penting artinya.¹ Terdapat beberapa karakteristik yang menjadikannya negara-negara Pasifik Selatan berbeda dengan kawasan lain. Pertama, negara di kawasan Pasifik Selatan disebut dengan 'microstate' karena memiliki jumlah populasi yang sedikit, serta areanya yang sempit. Kedua adalah letaknya yang berada di pulau, jauh dengan pusat dunia. Ketiga adalah negara yang berada di kawasan ini merupakan negara berkembang. Karena karakteristik ini, diperlukanlah kerjasama antar kawasan untuk menjaga eksistensinya dalam hubungan internasional.² Kestabilan politik Luar Negeri di wilayah Pasifik Selatan penting bagi Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan konsistensinya di kawasan Pasifik Selatan dalam menangani masalah-masalah regional.

Wilayah Pasifik merupakan wilayah yang cukup strategis dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Salah satu kepentingan utama Indonesia dalam menjaga hubungan dengan negara-negara Pasifik adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan regional Pasifik. Asia Pasifik dalam keterkaitannya dengan politik luar negeri Indonesia, merupakan bagian dari lingkaran konsentris. Dibuatnya lingkaran konsentris salah satunya didasari oleh kepentingan antarnegara, sehingga hubungan baik antarnegara pun selalu diupayakan demi kerjasama dan pencapaian

¹ Adil, Hilman. 1993. *Dinamika Perkembangan Pasifik Selatan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan PDII-LIPI.

² Ogashiwa, Yoko. 2002. "South Pacific Forum: Survival Under External Pressure" in *New Regionalisms in the Global Political Economy*, by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips and Ben Rosamond (eds). London: Routledge.

kepentingan. Indonesia telah memupuk hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN sejak awal. Selain itu, Indonesia dan negara-negara di Asia Pasifik pun memiliki dinamika tersendiri dalam hubungan antarnegara, seperti hubungannya dengan Australia, Timor Timur, dan Papua New Guinea.

Kondisi dan posisi geografis Indonesia yang sangat prospektif di Kawasan Asia Pasifik. Indonesia merupakan negara yang berada diantara dua samudra yaitu samudera Pasifik dan Hindia. Semua jalan penghubung antara kedua samudra melewati Kepulauan Indonesia. Secara geografis 1/3 jalur perdagangan dunia melewati selat Lombok, selat Malaka, dan selat Sunda. Selain itu dari sisi politik Indonesia memiliki peranan penting di Asia Pasifik, mengingat lingkaran konsentris pertama Politik Luar Negeri Indonesia adalah ASEAN. Kontribusi Indonesia di Asia Pasifik adalah sebagai motor penggerak terciptanya stabilitas perdamaian dan keamanan yang tertera dalam pasal I UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Keterlibatan aktif Indonesia di Asia Pasifik dapat dilihat dari terciptanya berbagai forum-forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF), East Asian Summit (EAS) dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) lainnya. Strategi Indonesia yang lain untuk berperan dalam pengembangan kawasan Pasifik Selatan adalah melalui bantuan kapasitas.

Kawasan Pasifik Selatan sendiri didiami oleh tiga budaya besar, yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Pengaruh budaya Melanesia terlihat dalam hubungan antara budaya dan kepemimpinan, konstitusi, dan pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Melanesia merupakan gugus kepulauan yang memanjang dari Maluku lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia. Indonesia memiliki 3 wilayah yang memiliki rumpun Melanesia yaitu wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya semangat solidaritas etnis yang tinggi dari beberap negara ras Melanesia, kemudian terbentuklah sebuah organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organization*) yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Melanesian Spearhead Group didirikan di Port Vila pada 14 Maret 1988 dan merupakan kelompok sub-regional di kawasan kepulauan Pasifik yang terdiri dari negara-negara Melanesia di Pasifik Barat, yang berdekatan dengan Australia, yaitu: Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon dan New Caledonia. Selain untuk memajukan kebudayaan dan nilai-nilai tradisi Melanesia, tujuan terbentuknya *Melanesian Spearhead Group* sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian di negara-negara Melanesia yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group*. Visi yang dimiliki oleh *Melanesian Spearhead Group* adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan

keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia.³

Kawasan kepulauan pasifik memiliki peranan penting bagi kedaulatan Indonesia terutama mengenai permasalahan Papua Barat. Rasa solidaritas sebagai sesama bangsa Melanesia membuat gerakan-gerakan yang menginginkan Papua Barat untuk merdeka mendapat sambutan hangat di negara-negara Melanesia. Negara-negara tersebut tergabung kedalam *Melanesian Spearhead Group*. Keberadaan negara-negara tersebut penting bagi Indonesia mengingat kasus kemerdekaan Papua Barat merupakan hal yang sensitif terutama dari dunia internasional karena menyangkut Hak Asasi manusia. Hubungan dengan negara-negara pasifik jika tidak dikelola dengan baik di khawatirkan oleh pemerintah Indonesia bahwa akan mengakibatkan mereka berpihak pada gerakan Papua Merdeka. Suara negara pasifik dalam PBB juga cukup didengar, sehingga menyulitkan posisi Indonesia di dunia Internasional. Meskipun pemerintah negara anggota *Melanesian Spearhead Group* mengakui integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak disahkannya Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969 tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian dari NKRI,⁴ namun kenyataannya *Melanesian Spearhead Group* melakukan bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme di Papua.

Pada KTT *Melanesian Spearhead Group* ke-18 di Fiji, Indonesia diterima dan diberikan status sebagai *observer*. Pada forum ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan mengenai kondisi Papua serta mempersilakan perwakilan *Melanesian Spearhead Group* melakukan kunjungan ke Papua untuk mendengar langsung terkait kebijakan pembangunan ekonomi serta aspek keamanan di Papua dan melihat kondisi di Papua secara langsung.⁵ Hal tersebut dilakukan terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Keterlibatan Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group*, berdampak pada munculnya perlawanan dari gerakan separatis di Papua yang terancam dipersulit untuk memerdekakan Papua. Pada Juni 2013, *The West Papuan National Coalition for Liberation* (WPNCL) / Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, mendaftarkan diri sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* pada

³ *Pentingnya Kerjasama Ekonomi Indonesia-Vanuatu*. <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/pentingnya-kerja-sama-ekonomi-indonesia-%E2%80%93-vanuatu> Diakses pada 9 Mei 2016, pukul 11.30 WIB

⁴ Bhakti, Ikrar Nusa. 2006. *Merajut Jaring-Jaring Kerja Sama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*. Jakarta: LIPI

⁵ SBY Kunjungi Fiji Untuk Jelaskan Kondisi Papua. <http://www.voaindonesia.com/content/sby-kunjungi-fiji-untuk-jelaskan-kondisi-papua/1938483.htm> di akses pada 10 Mei 2016, pukul 20.30 WIB

KTT yang dilaksanakan di Noumea. Permintaan keanggotaan ini menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*, yang akhirnya pada Juni 2015 WPNCL diberikan status sebagai *observer*. WPNCL sendiri adalah salah satu gerakan separatisme Papua yang dapat dikatakan merupakan anak turunan dari OPM.

RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- Mengapa Indonesia melakukan kerjasama dengan *Melanesian Spearhead Group* (MSG)?

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan rasionalitas Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

Studi Pustaka digunakan untuk mendukung penelitian sebagai bahan acuan sekaligus untuk menambah kajian mengenai keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*. Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dapat dijadikan acuan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian ini.

1. Dame Meg Taylor

Menurut Dame Meg Taylor dalam tulisannya "*Pacific Regionalism: Understanding the Pacific's regional architecture*" menguraikan tentang beberapa forum regional di wilayah Pasifik. Salah satunya adalah *Melanesian Spearhead Group* (MSG), terdiri dari Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu dan New Caledonia, yang telah menjadi pemecah politik yang efektif bagi permasalahan regional. *Melanesian Spearhead Group* telah menerapkan perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif bagi barang dan jasa, termasuk peningkatan keterampilan para tenaga kerja dan mencapai tingkat integrasi ekonomi yang belum ditemukan di wilayah pasifik secara menyeluruh. Tahun 2003 *Pacific Plan Review* menemukan bahwa sebagian besar pemimpin mengartikan kemunculan *Melanesian Spearhead Group* lebih bersifat melengkapi dari pada bersaing. *Melanesian Spearhead Group* diartikan sebagai cerminan keistimewaan dari ras Melanesia, Polinesia, dan Micronesia, serta sebagai perwujudan nyata dari *Melanesia Way*. *Melanesian Spearhead Group* menghadapi beberapa tantangan terkait keadaan buruk *West Papua*, di bawah kekuasaan Indonesia, dengan memberikan status sebagai *observer*.

2. Gregory Poling

Gregory Poling melalui tulisannya yang berjudul "*The Upside of Melanesian Leaders' West Papua Compromise*" menguraikan tentang perjuangan

Melanesian Spearhead Group terkait status keanggotaan Papua yang masi dipertanyakan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua menjadi bahan pertimbangan utama untuk mendukung Papua menjadi bagian dari *Melanesian Spearhead Group*. Keinginan Indonesia menjalin hubungan dengan *Melanesian Spearhead Group* terlihat sebagai suatu cara untuk menghentikan aspirasi Papua tergabung dalam forum yang sama. Dengan diberikannya status *observer* kepada Papua Barat menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia jika status tersebut adalah langkah awal bagi Papua Barat untuk menjadi anggota tetap walaupun pemimpin *Melanesian Spearhead Group* menyatakan bahwa Papua Barat hanya akan mewakili masyarakat Papua yang berada di luar wilayah Papua. Indonesia telah mengajukan petisi keras untuk mencegah kelompok separatist Papua diterima sebagai anggota penuh *Melanesian Spearhead Group*.

3. Ronald May

Ronald May dalam "*The Melanesian Spearhead Group: testing Pacific island solidarity*" menguraikan tentang hubungan kerjasama yang dilakukan antara anggota-anggota wilayah Pasifik yang tergabung ke dalam forum *Melanesian Spearhead Group*. Dikatakan bahwa awal pembentukan *Melanesian Spearhead Group* adalah untuk melakukan kerjasama perekonomian antara negara-negara anggota sehingga dapat membentuk wilayah sub-regional perdagangan bebas di Pasifik, akan tetapi pada kenyataannya *Melanesian Spearhead Group* dibentuk bukan dengan tujuan perekonomian tetapi lebih kepada politik. *Melanesian Spearhead Group* memiliki solidaritas dan tekak yang kuat untuk menyuarakan ras Melanesia di wilayah Pasifik, baik kepada *member countries* maupun *non-member countries*.

Dari uraian beberapa tulisan yang ditemukan, dalam penelitian ini penulis menemukan persamaan dan perbedaan untuk dapat mendukung dan menunjang studi kebaruan dalam tulisan ini. Letak persamaan dari tulisan yang telah penulis jabarkan adalah sama-sama menjelaskan mengenai keterlibatan *Melanesian Spearhead Group*, Indonesia, dan *West Papua* di wilayah Pasifik Selatan. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada Indonesia sebagai unit analisisnya untuk menjelaskan rasionalitas Indonesia melakukan kerjasama dengan *Melanesian Spearhead Group* dan dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Politik Luar Negeri.

1. Konsep Politik Luar Negeri

Kepentingan nasional merupakan landasan terpenting dalam Politik Luar Negeri suatu negara. Dalam hal ini kepentingan nasional adalah hal vital dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Pada umumnya kepentingan nasional selalu berkaitan dengan kemandirian, kesejahteraan, dan kekuasaan.⁶ Politik luar negeri secara umum merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk

⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 1987, *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Bina Cipta, hal 35

mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam pencaturan dunia internasional.⁷ Sehingga bisa dikatakan Politik Luar Negeri juga sebagai penentu arah bahkan menentukan posisi suatu negara dalam dunia internasional.

Politik luar negeri merupakan refleksi dari realitas yang terjadi di dalam negeri serta juga dipengaruhi oleh situasi internasional. Hal ini diperkuat oleh Rosenau yang menjelaskan pengkajian kebijakan luar negeri suatu negara akan menghadapi situasi yang kompleks meliputi kebutuhan eksternal dan kehidupan internal.⁸ Berarti kedua kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Adanya faktor internal merupakan tempat pertautan kepentingan nasional, sedangkan eksternal merupakan tempat dimana negara dapat mengartikulasikan kepentingan nasional sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai.

Politik luar negeri Indonesia memiliki landasan idiil yaitu dasar negara RI yang berpedoman pada Pancasila, sedangkan landasan konstitusional Politik Luar Negeri RI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi:⁹“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sedangkan alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah: “...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...”.

Sebagai Landasan operasional Politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional yang senantiasa berubah disesuaikan dengan kepentingan nasional. Pada masa pemerintahannya Joko Widodo mengungkapkan prinsip “bebas-aktif” dalam politik luar negeri Indonesia, namun landasan operasionalnya adalah menganut pada prinsip Trisakti. Prinsip Trisakti ini merupakan arah Politik Luar Negeri Presiden Soekarno. Makna dari prinsip Triskati yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo di masa pemerintahannya adalah sebagai berikut:¹⁰

4. Berdaulat di bidang politik, hakikat terpenting dari negara yang berdaulat. kemampuan untuk menjaga kemandirian dan mengaktualisasikan kemerdekaannya dalam seluruh aspek kehidupan bernegara

5. Berdikari di bidang ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama pembentukan produksi
6. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Presiden Joko Widodo dalam menerapkan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif adalah menginterpretasikan makna “Bebas” didasarkan pada kemandirian, dan kedaulatan dari Indonesia dalam menentukan kebijakan dan arah politik itu sendiri.¹¹ Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa agenda ataupun misi yang akan ditempuh, sebagai berikut:¹²

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Sedangkan pemaknaan “Aktif” dalam Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo adalah dimaknai dengan mewujudkan misi yaitu terselip makna *gotong royong* yang dalam hal ini dimaknai dengan menciptakan kemandirian kedaulatan tidak bisa dilakukan sendiri namun dapat merangkul berbagai kekuatan dan terlibat aktif dalam berbagai momentum-momentum kerjasama. Keterlibatan *Aktif* Indonesia dalam penerapannya terlihat dalam beberapa agenda Politik Luar Negeri Indonesia, sebagai berikut:¹³

- a. Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik (kepemimpinan Indonesia di ASEAN; arsitektur kawasan

⁷ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

⁸Ibid

⁹ Reni Windiani, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*, Vol. 1, No.2 (2010), dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4894/4438>, di unduh pada 5 Juni 2015, pukul 09.45 WIB

¹⁰ Nur Amaliyah, 2015, *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi*, Makassar: Universitas Hasanuddin

¹¹ ibid

¹² Visi misi Jokowi-JK “Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”, http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diunduh pada 5 Juni 2016, pukul 10.30 WIB

¹³ Nur Amaliyah, op.cit

East Asia Summit; kemitraan strategis bilateral; integrasi ekonomi regional; dan perdagangan bebas; IORA).

- b. Melibatkan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat, serta melakukan penataan infrastruktur diplomasi (penguatan Kemlu, diplomasi publik, koordinasi antar Kementerian dan DPR dalam politik luar negeri, pendidikan dan pelatihan Kemlu).
- c. Mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selak, dan teluk sebagai masa depan peradaban Indonesia. "Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, Indonesia harus memiliki jiwa Cakrawati Samudra; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hampasan ombak yang menggulung".
- d. Meningkatkan peran global Indonesia sebagai kekuatan *middle power* regional secara selektif (multilateralisme; kekuatan demokrasi dan Islam moderat; kerjasama G-20; *transnational crimes and issues*; perdamaian dunia).

2. Model Aktor Rasional Graham T. Allison

Allison membuat kajian politik luar negeri yang revolusioner karena dianggap menantang asumsi rasionalisme dalam politik luar negeri yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan sedikit banyak dianut juga oleh realisme dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara.¹⁴ Dalam asumsi rasionalisme, tindakan suatu negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Bagi Allison, analisis rasional yang disebut 'Model Aktor Rasional' mendasarkan diri pada imajinasi karena tidak mendasarkan analisis pada fakta empirik yang sering di sebut melanggar prinsip hukum *falsifiability*.

Dalam perspektif "Decision Making Process", Graham T Allison dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*, yang diterbitkan Boston: Little, Brown and Company tahun 1971, mengajukan tiga model pengambilan keputusan, yaitu Model Aktor Rasional (MAR), Model Proses Organisasi (MPO), dan Model Politik Birokratik (MPB), yang akan diuraikan secara singkat berikut ini:

1. Model Aktor Rasional (*Rational Actor*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan

rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent.

2. Model Proses Organisasi (*the Organizational Process*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

3. Model Politik Birokratik (*Bureaucratic/Governmental Politics*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar stake holders terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks

Asumsi dasar perspektif model aktor rasional yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik global.¹⁵ Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan yang memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai (*goals and objectives*).¹⁶

Keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dan tujuan strategis dalam menyusun kebijakan luar negeri. Proses pembuatan kebijakan luar negeri dilakukan oleh aktor yang mana masing-masing berperan sebagai pemain. Hubungan antar aktor secara umum digambarkan dalam proses tarik ulur satu sama lain (*pulling and hauling*). Kebijakan luar negeri dipahami sebagai *political outcomes*. Menurut Allison *outcomes* bukanlah penyelesaian yang dipilih oleh para aktor tetapi merupakan hasil dari kompromi, koalisi dan kompetisi antar aktor.¹⁷

¹⁴ Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.

¹⁵ Bruce Russett dan Harvey Starr. 1998. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co.

¹⁶ Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company.

¹⁷ *Ibid*

Menganalisa *foreign policy* sebagai bentuk proses rasionalitas atau disebut *foreign policy making* as rational process menurut Allison bahwa Rational decision making model terbentuk dari aktor kesatuan (*unitary actor*) yang menjalankan peran sebagai rasional aktor dalam pengambilan sebuah keputusan. Kebijakan luar negeri tersebut menjadi sebuah langkah dalam menangani konflik maupun permasalahan yang dihadapi negara. Seperti dikatakan dalam kaitannya mengenai Rational Decision-Making Model adalah bahwasanya sebagai “*foreign policy as results from an intellectual process where the actors choose what is the best for the country and select*”. Maka dalam rasionalitas pengambilan kebijakan sebagai tujuan menjalankan kebijakan yang terbaik bagi negara.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksplanatif. Metode eksplanatif bertujuan untuk menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Penulis menggunakan metode eksplanasi untuk menjelaskan tentang kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia selalu berusaha berada di posisi netral sebagai penengah dalam permasalahan. Indonesia dibawah kepemimpinan pemerintah Joko Widodo melaksanakan hubungan bilateral dengan negara-negara yang mampu memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia menempuh cara diplomasi dalam menjalin kerjasama dengan *Melanesian Spearhead Group*. Cara ini dilakukan melihat adanya dukungan dari negara anggota *Melanesian Spearhead Group* kepada kelompok Papua Merdeka. Namun disisi lain negara anggota *Melanesian Spearhead Group* memberikan dukungan kepada Indonesia untuk memperjuangkan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama dilakukan karena setiap negara memiliki tujuannya masing-masing. Setiap negara merumuskan kebijakan terkait kepentingan negara tersebut dan atas dasar kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu strategi yang dibentuk suatu negara dalam menghadapi negara lain.

Indonesia diterima dan diberikan status sebagai *observer* pada KTT *Melanesian Spearhead Group* ke-18 di Fiji. Pada forum ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan mengenai kondisi Papua serta mempersilakan perwakilan *Melanesian Spearhead Group* melakukan kunjungan ke Papua untuk mendengar langsung terkait kebijakan pembangunan ekonomi serta

aspek keamanan di Papua dan melihat kondisi di Papua secara langsung.¹⁸ Hal tersebut dilakukan terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Keterlibatan Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group*, berdampak pada munculnya perlawanan dari gerakan separatis di Papua yang terancam dipersulit untuk memerdekakan Papua. Pada Juni 2013, *The West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL)*, “Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan” yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, mendaftarkan diri sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* pada KTT yang dilaksanakan di Noumea. Permintaan keanggotaan ini menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*, yang akhirnya pada Juni 2015 WPNCL diberikan status sebagai *observer*. WPNCL sendiri adalah salah satu gerakan separatisme yang dapat dikatakan merupakan anak turunan dari OPM.

Banyak faktor menjelaskan munculnya separatisme yaitu sejarah, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, dan perasaan dimarginalkan oleh sistem politik dan ekonomi. Masalah ini akan makin rumit karena globalisasi dan keterbukaan menjadikan mereka yang terlibat mempunyai ruang lebih bebas untuk bergerak ke luar batas nasional. Organisasi Papua Merdeka muncul ketika salah satu wilayah di Indonesia yaitu Papua diperdebatkan perihal statusnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah konflik di Papua diawali sejak penyatuan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memenangkan proses referendum tahun 1969, maka pemerintah NKRI mengambil langkah Operasi Militer untuk membasmi seluruh Perlawanan Rakyat Pribumi Papua yang menentang NKRI. Sidang Umum PBB memutuskan hasil penajakan opini, dan secara resmi Papua menjadi provinsi kedua puluh tujuh Indonesia pada tanggal 19 November 1969. Namun di sisi lain, hasil referendum mendapat pergolakan dari kelompok yang menghendaki Papua menjadi negara yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Kelompok ini menamakan diri mereka dengan sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Organization*.¹⁹

Faktor lainnya dalam permasalahan Papua adalah kurang jelasnya undang-undang yang telah dibuat serta keterbatasan kemampuan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Tingginya potensi konflik antar penduduk lokal dan non lokal memunculkan tingkat kesenjangan dan perubahan sosial yang dialami oleh penduduk lokal.

¹⁸ SBY Kunjungi Fiji Untuk Jelaskan Kondisi Papua. <http://www.voaindonesia.com/content/sby-kunjungi-fiji-untuk-jelaskan-kondisi-papua/1938483.htm> di akses pada 10 Mei 2016, pukul 20.30 WIB

¹⁹ The New York Agreement. (1962). Article 18. New York: United Nations tanggal 15 Agustus 1962. Dalam *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization”*

Adanya Otsus (Otonomi Khusus) yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua menjadi kurang optimal. Beberapa kendala yang muncul sehingga mengganggu efektifitas dalam penerapan Otonomi Khusus adalah sebagai berikut:²⁰ lambatnya penerbitan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua, minimnya aturan pelaksanaan dalam bentuk Perdasu dan Perdasus, lemahnya konsistensi atas perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, konflik pemekaran wilayah, keterbatasan dan lemahnya sumber daya manusia Papua dalam merespon kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Papua dilihat dari perspektif pembangunan merupakan salah satu daerah yang paling banyak tantangannya di Indonesia. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan sosial politik budaya.²¹

Keuntungan Indonesia secara umum terkait hubungannya dengan negara-negara Pasifik adalah menjaga kestabilan regional wilayah Pasifik. Perkembangan domestik suatu negara tidak luput dari perselisihan atau bentrokan antara satu kelompok dengan kelompok lain atau etnis tertentu yang menentang pemerintahan untuk memenuhi tuntutan mereka. Perkembangan keamanan domestik berpengaruh dalam politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain dalam sistem internasional. Suatu negara akan berusaha menyelesaikan konflik dengan mengambil kebijakan luar negeri dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, sama halnya dengan Indonesia yang melakukan kerjasama dengan negara-negara *Melanesian Spearhead Group* dalam menjaga keutuhan NKRI di Papua. Dalam persoalan ini, Indonesia harus mengambil kebijakan yang signifikan untuk menghentikan perselisihan di Papua, mengingat kedekatan geografis antara Indonesia dan negara-negara *Melanesian Spearhead Group* lainnya. Adanya dukungan dari negara-negara Melanesia terhadap gerakan separatisme di Papua menjadi faktor pendukung untuk merdeka.

IV. KESIMPULAN

Dukungan dalam melakukan kerjasama sangat penting bagi kelancaran suatu hubungan antar negara. Kerjasama menjadi sebuah alat dalam berdiplomasi yang kemudian diharapkan sikap kedua negara selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Dua sisi dukungan dari *Melanesian Spearhead Group* menjadikan Indonesia harus lebih bijaka dalam mengambil keputusan. Di satu sisi *Melanesian Spearhead Group* mendukung organisasi

Papua merdeka dengan memberikan dukungan dan bantuan berupa akses keterlibatan sebagai bagian dari *Melanesian Spearhead Group*. Di sisi lainnya, negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* menjadikan Indonesia sebagai rekan yang baik dalam meningkatkan hubungan kerjasama. Indonesia melakukan kerjasama dengan *Melanesian Spearhead Group* karena Indonesia ingin mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* untuk mencegah kelompok Papua merdeka menjadi anggota tetap guna menghambat pergerakan dalam memerdekakan Papua dan Indonesia juga ingin menjadi aktor penggerak untuk menciptakan stabilitas di Pasifik Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ¹ Adil, Hilman. 1993. *Dinamika Perkembangan Pasifik Selatan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan PDII-LIPI.
- [2] ¹ Ogashiwa, Yoko. 2002. "South Pacific Forum: Survival Under External Pressure" in *New Regionalisms in the Global Political Economy*, by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips and Ben Rosamond (eds). London: Routledge.
- [3] ¹ *Pentingnya Kerjasama Ekonomi Indonesia-Vanuatu*. <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/pentingnya-kerja-sama-ekonomi-indonesia-%E2%80%93-vanuatu> Diakses pada 9 Mei 2016, pukul 11.30 WIB
- [4] ¹ Bhakti, Ikrar Nusa. 2006. *Merajut Jaring-Jaring Kerja Sama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*. Jakarta: LIPI
- [5] ¹ SBY Kunjungi Fiji Untuk Jelaskan Kondisi Papua. <http://www.voaindonesia.com/content/sby-kunjungi-fiji-untuk-jelaskan-kondisi-papua/1938483.htm> di akses pada 10 Mei 2016, pukul 20.30 WIB
- [6] ¹ Budiono Kusumohamidjojo, 1987, *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Bina Cipta, hal 35
- [7] ¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- [8] ¹ Ibid
- [9] ¹ Reni Windiani, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*, Vol. 1, No.2 (2010), dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4894/4438>, di unduh pada 5 Juni 2015, pukul 09.45 WIB
- [10] ¹ Nur Amaliyah, 2015, *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi*, Makassar: Universitas Hasanuddin
- [11] ¹ ibid
- [12] ¹ Visi misi Jokowi-JK "Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian", http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diunduh pada 5 Juni 2016, pukul 10.30 WIB
- [13] ¹ Nur Amaliyah, op.cit
- [14] ¹ Allison, Graham T.1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- [15] ¹ Bruce Russett dan Harvey Starr. 1998. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co.
- [16] ¹ Allison, Graham T.1971. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company.
- [17] ¹ Ibid
- [18] ¹ SBY Kunjungi Fiji Untuk Jelaskan Kondisi Papua. <http://www.voaindonesia.com/content/sby-kunjungi-fiji-untuk->

²⁰ Azmi Muttaqin. 2014. Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Dalam JOM FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015

²¹ Tampubolon, Lia Kartika. 2015. *Kerjasama Teknik Indonesia – Melanesian Spearhead Group Terhadap keutuhan NKRI di Papua Tahun 2011-2014*. Universitas Riau

[jelaskan-kondisi-papua/1938483.htm](#) di akses pada 10 Mei 2016, pukul 20.30 WIB

- [19] ¹ The New York Agreement. (1962). Article 18. New York: United Nations tanggal 15 Agustus 1962. Dalam *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization*
- [20] ¹ Azmi Muttaqin. 2014. Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Dalam JOM FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015
- [21] ¹ Tampubolon, Lia Kartika. 2015. Kerjasama Teknik Indonesia – Melanesian Spearhead Group Terhadap keutuhan NKRI di Papua Tahun 2011-2014. Universitas Riau